

Kapolres Bombana Ajak Tokoh Agama dan Adat Bersinergi Jaga Kamtibmas

Bombana, sultranet.com - Kapolres Bombana, AKBP Wisnu Hadi, S.I.K., M.I.K., menggelar silaturahmi dengan tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh masyarakat di Kabupaten Bombana.

Pertemuan yang berlangsung di Aula Rekonfu Polres Bombana pada Selasa (11/2/2025) ini bertujuan memperkuat sinergi dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

Kepada awak media sultranet.com, AKBP Wisnu Hadi menegaskan bahwa menjaga kamtibmas bukan hanya tugas kepolisian, tetapi juga menjadi tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat.

“Kami ingin membangun kerja sama yang erat dengan para tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh masyarakat agar tercipta situasi yang aman dan kondusif di Bombana,” ujarnya.

Ia juga menyoroti keberagaman suku yang ada di Bombana, baik suku asli Moronene maupun pendatang, yang selama ini hidup berdampingan dengan harmonis. Menurutnya, kebersamaan ini menjadi modal penting dalam menjaga stabilitas daerah.



Foto bersama Kapolres, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat

Selain perkenalan dan diskusi mengenai kondisi kamtibmas di wilayah hukum Polres Bombana, pertemuan ini juga membahas penguatan nilai-nilai keagamaan dan solidaritas sosial.

“Dengan keimanan yang kuat, kita bisa membentuk karakter masyarakat yang lebih baik. Ini akan berdampak positif terhadap keamanan dan ketertiban,” tambahnya.

Kapolres juga menyampaikan komitmen institusi yang dipimpinnya itu untuk melakukan perbaikan-perbaikan internal agar kepolisian lebih dekat dan dicintai masyarakat.

Silaturahmi ini turut dihadiri Waka Polres Bombana, Kompol Reda Irfanda, S.H., S.I.K., M.H., serta para pejabat utama Polres Bombana. Kegiatan diakhiri dengan sesi foto bersama sebagai simbol kebersamaan dalam menjaga kamtibmas di Bombana.

Pertemuan berlangsung dengan lancar dan kondusif, menandai komitmen kuat

antara kepolisian dan masyarakat dalam membangun lingkungan yang aman dan harmonis.

TP-PKK Kolut Dukung Penguatan Posyandu ILP

Lasusua, sultranet.com - Tim Penggerak PKK Kabupaten Kolaka Utara (Kolut) dibawah kepemimpinan Pj. Ketua Nurhayati Yusmin, S.Pd., M.M., menghadiri kegiatan Posyandu Integrasi Layanan Terpadu (ILP) di Desa Bukit Baru, Kecamatan Batu Putih, Senin (10/2).

Kehadiran istri orang nomor satu di Kolaka Utara itu, sebagai bentuk dukungan terhadap peningkatan layanan kesehatan ibu, anak, dan lansia di tingkat desa.

Saat menghadiri kegiatan tersebut, Nurhayati Yusmin menegaskan bahwa Posyandu memiliki peran penting dalam memastikan kesehatan masyarakat, terutama kelompok rentan seperti ibu hamil dan balita.

Ia juga mengapresiasi tenaga kesehatan serta kader Posyandu yang terus berupaya memberikan pelayanan terbaik.

“Kami berharap masyarakat semakin sadar akan pentingnya Posyandu dan aktif memanfaatkannya untuk menjaga kesehatan keluarga. Posyandu adalah ujung tombak pelayanan kesehatan di desa,” ujarnya.



Selain memantau jalannya layanan kesehatan, Tim Penggerak PKK juga memberikan edukasi tentang pentingnya pola hidup sehat dan gizi seimbang.

Mereka mengajak warga untuk rutin membawa anak-anak ke Posyandu guna memantau tumbuh kembang mereka.

Nurhayati Yusmin juga menekankan pentingnya peran keluarga dalam mendukung kesehatan anak.

“Peran orang tua sangat besar dalam memastikan anak-anak tumbuh sehat. Dengan rutin ke Posyandu, kita bisa mendeteksi dini jika ada masalah kesehatan dan segera menanganinya,” tandasnya.



Kegiatan ini disambut antusias oleh masyarakat. Mereka merasa diperhatikan dan didukung dalam mendapatkan pelayanan kesehatan yang lebih baik.

Dengan adanya dukungan dari TP PKK Kolut, diharapkan Posyandu di Batu Putih semakin berkembang dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.

Sumber: diskominfo Kolut

Dinas Ketahanan Pangan Bombana Teken Perjanjian Kinerja 2025

Bombana, sultranet.com - Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bombana melaksanakan penandatanganan Perjanjian Kinerja (PK) bagi para pejabat

struktural sebagai bentuk komitmen dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel. (11/2)

Kegiatan yang berlangsung di Ruang Rapat Kantor Dinas Ketahanan Pangan Bombana ini dihadiri oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Binnuraeni AS, S.E., S.Pd., Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan, Sulaiman, S.H., M.M., serta para pejabat eselon dan pejabat struktural yang terlibat dalam kesepakatan kinerja tahun 2025.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan Bombana, Binnuraeni AS, dalam sambutannya menegaskan pentingnya perjanjian ini sebagai pedoman dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab di tahun mendatang.

“Penandatanganan perjanjian kinerja ini bukan sekadar formalitas, tetapi menjadi wujud nyata komitmen kami dalam meningkatkan efektivitas layanan dan tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Kami berharap seluruh pejabat struktural dapat bekerja lebih optimal untuk mendukung program ketahanan pangan di Bombana,” ujarnya.

Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen kesepakatan antara pimpinan instansi dengan bawahannya terkait pelaksanaan program dan kegiatan tertentu. Dokumen ini menjadi bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada hasil.

Perjanjian ini memuat penugasan dari pimpinan, program dan kegiatan yang harus dilaksanakan, indikator kinerja, serta target yang harus dicapai dalam kurun waktu satu tahun. Selain sebagai bentuk komitmen, PK juga menjadi dasar dalam evaluasi kinerja, pemberian penghargaan dan sanksi, serta monitoring dan supervisi kinerja pegawai.

Dengan adanya perjanjian ini, setiap pejabat memiliki tanggung jawab untuk mencapai indikator kinerja yang telah ditetapkan. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dalam menjalankan program ketahanan pangan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Bombana.

Kegiatan ini diakhiri dengan sesi foto bersama sebagai simbol komitmen kolektif dalam menjalankan tugas dengan dedikasi dan profesionalisme di tahun 2025.

ATM Bank Sultra Resmi Beroperasi di Mess Pemprov Sultra Jakarta

Jakarta, sultranet.com - Kemudahan akses layanan perbankan bagi warga Sulawesi Tenggara (Sultra) di Jakarta semakin nyata dengan dioperasikannya mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Bank Sultra di Mess Pemprov Sultra, Jalan Sumenep, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa, 11 Februari 2025.

ATM ini menyediakan layanan penarikan tunai dengan pecahan Rp100.000, serta berbagai fitur transaksi lainnya, seperti transfer, pembelian pulsa, dan cek saldo. Kehadirannya diharapkan dapat membantu pegawai, tamu, dan masyarakat Sultra yang membutuhkan layanan perbankan lebih cepat dan mudah di ibu kota.

Direktur Utama Bank Sultra, Abdul Latif, menegaskan bahwa penyediaan fasilitas ini merupakan bagian dari komitmen Bank Sultra dalam meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara.

“Bank Sultra terus berupaya menghadirkan layanan terbaik bagi nasabah, termasuk mereka yang berada di luar daerah. ATM di Mess Pemprov Sultra ini adalah salah satu langkah konkret dalam mempermudah akses transaksi keuangan bagi warga Sultra di Jakarta,” ujarnya.

Sekretaris Daerah Sulawesi Tenggara, Drs. Asrun Lio, M.Hum., Ph.D., menyambut baik inisiatif ini dan mengapresiasi langkah Bank Sultra dalam menghadirkan fasilitas yang bermanfaat bagi banyak pihak.

“Keberadaan ATM ini sangat membantu pegawai, tamu, serta masyarakat Sultra di Jakarta. Kami berharap Bank Sultra terus berinovasi dan memperluas layanannya, baik di dalam maupun di luar Sultra, demi kemudahan akses layanan perbankan bagi masyarakat,” katanya.

Sementara itu, Plt. Kepala Badan Penghubung Pemprov Sultra Jakarta, Mustakim,

S.Kom., M.M., juga mengungkapkan rasa syukur atas beroperasinya ATM tersebut. Menurutnya, keberadaan fasilitas ini telah lama dinantikan untuk memudahkan transaksi keuangan bagi mereka yang tidak memiliki layanan mobile banking.

“ATM ini bukan hanya memudahkan transaksi keuangan bagi warga Sultra di Jakarta, tetapi juga memperkenalkan Bank Sultra sebagai bank milik Pemprov Sultra yang dapat diakses oleh masyarakat luas,” ujarnya.

Dengan dioperasikannya ATM di Mess Pemprov Sultra, kini terdapat dua gerai ATM Bank Sultra di Jakarta. Satu lagi berada di Kantor Cabang Bank Sultra Jakarta yang beralamat di Jalan K.H. Mas Mansyur, Tanah Abang, Jakarta Pusat.

Dampingi Kelompok Tani Guna Tingkatkan Hasil Panen, Salah Satu Peran Aktif Babinsa Koramil 1431-01/Rumbia

Bombana, Sultranet.com - Babinsa Koramil 1431-01/Rumbia, Sertu La Salihu, terus aktif mendampingi kelompok tani guna meningkatkan hasil panen. Bertempat di Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Rumbia Tengah, Kabupaten Bombana, ia membantu penyemprotan hama pada tanaman padi varietas jenis Cihereng yang berusia satu minggu di lahan milik Baharudin, anggota Kelompok Tani Mattiro. Selasa, (11/02/2025)

Pendampingan dilakukan di lahan seluas 1,20 hektare, yang seluruhnya telah ditanami padi. Sertu La Salihu menekankan pentingnya penyemprotan dan pemupukan yang tepat waktu agar tanaman dapat tumbuh optimal.

“Kami mengimbau petani untuk selalu berkoordinasi dengan Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) jika mengalami kendala, sehingga pertumbuhan tanaman dapat

terjaga dengan baik,” ujarnya.



Baharudin, perwakilan Kelompok Tani Mattiro, mengapresiasi pendampingan yang diberikan Babinsa. Ia menyebut kehadiran Babinsa sangat membantu petani dalam mengatasi permasalahan di lapangan.

“Pendampingan seperti ini sangat bermanfaat bagi kami. Semoga hasil panen tahun ini lebih baik,” ungkapnya.

Batuud Koramil 1431-01/Rumbia, Pelda La Ulo, mewakili Danramil menyampaikan bahwa pihaknya telah menginstruksikan Babinsa di jajarannya untuk terus aktif mendampingi para petani.

“Pendampingan ini merupakan bagian dari tugas Babinsa dalam membantu masyarakat, terutama dalam meningkatkan hasil panen guna mendukung ketahanan pangan,” katanya.

Melalui kegiatan ini, diharapkan sinergi antara Babinsa, petani, dan PPL dapat semakin erat. Dengan pendampingan yang berkelanjutan, produktivitas pertanian di wilayah Rumbia Tengah dapat terus meningkat, memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat setempat.

Posyandu Kelurahan Doule Berikan Layanan Kesehatan dan Makanan Tambahan untuk Ibu dan Anak

Bombana, sultranet.com - Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) di Kelurahan Doule, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Bombana, kembali menggelar kegiatan rutin yang berlangsung setiap tanggal 11 setiap bulannya. Kegiatan yang digelar di Kantor Lurah Doule ini bertujuan meningkatkan kesehatan masyarakat, khususnya ibu hamil, bayi, dan balita. (Selasa, 11 Februari 2025)

Pada posyandu kali ini, selain pemeriksaan kesehatan, pihak kelurahan juga membagikan makanan tambahan bergizi bagi ibu hamil dan balita. Bantuan ini diharapkan dapat menunjang pertumbuhan dan perkembangan anak serta memastikan asupan gizi ibu hamil tetap terjaga.

Lurah Doule, Hj. Surisma, S., M.A.P., menegaskan pentingnya kegiatan posyandu sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.

“Posyandu ini merupakan bentuk kepedulian kami terhadap kesehatan ibu dan anak. Dengan adanya pemberian makanan tambahan, kami ingin memastikan ibu hamil dan balita mendapatkan asupan gizi yang cukup. Kami juga berterima kasih kepada Puskesmas Rumbia yang turut serta dalam pemeriksaan kesehatan serta penyuluhan bagi masyarakat,” ujarnya.

Dalam kegiatan ini, tenaga kesehatan dari Puskesmas Rumbia memberikan layanan pemeriksaan kesehatan ibu hamil, penimbangan bayi dan balita, serta penyuluhan mengenai pola hidup sehat. Masyarakat yang hadir juga diberikan informasi mengenai pentingnya imunisasi, pencegahan stunting, dan pola makan seimbang bagi anak-anak.

Selain layanan kesehatan, posyandu ini juga menjadi wadah bagi warga untuk

berdiskusi langsung dengan tenaga medis mengenai berbagai permasalahan kesehatan yang mereka alami. Pemerintah kelurahan berharap kegiatan ini dapat terus berjalan secara konsisten dan menjadi contoh bagi kelurahan lain dalam meningkatkan layanan kesehatan masyarakat.

“Kami ingin posyandu ini menjadi tempat yang nyaman bagi ibu hamil dan balita untuk mendapatkan layanan kesehatan berkualitas. Semoga program ini terus berjalan dengan baik dan memberikan manfaat luas bagi masyarakat,” tambah Hj. Surisma.

Masyarakat setempat menyambut baik kegiatan posyandu ini. Mereka berharap program serupa dapat terus ditingkatkan agar layanan kesehatan semakin mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, khususnya bagi ibu dan anak di wilayah Kecamatan Rumbia.

Dengan adanya kegiatan rutin ini, diharapkan angka kesehatan ibu dan anak di Kelurahan Doule dapat terus meningkat serta mendukung upaya pemerintah dalam menciptakan generasi yang sehat dan berkualitas.

Ketua Organisasi Pengusaha di Sultra “AT” Dilaporkan atas Dugaan Penipuan Rp1,1 M terkait Tambang

Kendari, sultranet.com - Seorang pengusaha berinisial AT, yang menjabat sebagai ketua salah satu organisasi pengusaha di Sulawesi Tenggara, dilaporkan ke Polda Sultra atas dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan. Laporan ini diajukan oleh kuasa hukum korban, Sukdar, S.H., M.H., dari Sukdar-Partners Law Firm, pada 6 Februari 2025.

Sukdar mengungkapkan bahwa kasus ini berawal sejak Oktober 2011, ketika

kliennya, berinisial HT, berencana terjun ke bisnis pertambangan nikel namun tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP). Korban kemudian diperkenalkan kepada AT, yang mengaku bisa membantunya mendapatkan kerja sama Joint Operation (JO) dengan salah satu perusahaan tambang di Marombo, Konawe Utara.

“AT menyampaikan bahwa untuk mendapatkan JO, korban harus menyiapkan dana minimal Rp2 miliar hingga Rp5 miliar. Karena keterbatasan dana, korban hanya mampu menyediakan Rp1,1 miliar,” ungkap Sukdar saat ditemui di kantornya.

Pada 2 November 2011, korban bertemu dengan AT di Kota Kendari. Dalam pertemuan itu, AT menjanjikan bahwa dalam waktu 15 hingga 30 hari setelah dana diserahkan, kontrak JO akan diberikan. AT beralasan bahwa prosesnya masih menunggu pengurusan IUP Operasi Produksi. Meyakini janji tersebut, korban menyerahkan uang sebesar Rp1,15 miliar kepada AT melalui transfer di Bank Mandiri Cabang Kendari, yang dibuktikan dengan kuitansi bermaterai dan ditandatangani oleh AT.

Namun, setelah 17 hari, korban mulai mempertanyakan perkembangan kontrak JO yang dijanjikan. AT meminta korban untuk bersabar. Hingga tiga tahun berlalu, pada April 2014, korban kembali menagih uangnya, tetapi AT tidak memberikan kejelasan. Upaya mediasi dan penyelesaian secara kekeluargaan telah dilakukan, termasuk teguran tertulis, namun AT hanya bersedia mengembalikan Rp800 juta, yang ditolak oleh korban.

Tim hukum korban, Moh. Zuhdy Al Ghiffari, S.H., M.H., menambahkan bahwa hingga saat ini korban mengalami kerugian sebesar Rp1,14 miliar. “Kasus ini sudah berjalan 14 tahun. Klien kami tidak hanya mengalami kerugian materi, tetapi juga waktu dan penderitaan lainnya. Karena itu, kami melaporkan AT ke Polda Sultra atas dugaan penipuan dan penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 dan Pasal 372 KUHP,” jelas Zuhdy.

Selain AT, korban juga melaporkan seseorang berinisial JN, yang diduga berperan dalam memperkenalkan korban kepada AT serta turut melakukan tipu muslihat yang menyebabkan kerugian tambahan sebesar Rp300 juta. Dengan demikian, total kerugian korban mencapai Rp1,44 miliar.

“Kami menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada aparat penegak hukum,

khususnya Subdit 1 Unit 2 Reskrim Polda Sultra, agar korban mendapatkan keadilan atas kerugian yang dialaminya,” pungkask Zuhdy.

Pemprov Sultra Hadiri Rakor Pengendalian Inflasi, Antisipasi Kenaikan Harga Jelang Ramadan

Kendari, sultranet.com – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Pemprov Sultra) menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) secara virtual, Senin, 10 Februari 2025. Rakor yang berlangsung di Ruang Rapat Biro Perekonomian Sekretariat Daerah (Setda) Sultra ini membahas strategi pengendalian harga menjelang bulan suci Ramadan.

Plt. Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri, Toms Tohir, yang memimpin rakor, menekankan pentingnya langkah konkret untuk mengantisipasi kenaikan harga kebutuhan pokok. “Bulan Ramadan tinggal dua minggu lagi. Kita harus melakukan konsolidasi dan memastikan stok kebutuhan pokok aman. TPID serta instansi terkait harus lebih serius dalam menghadapi potensi kenaikan harga,” ujar Toms Tohir.

Rakor ini juga dihadiri sejumlah pejabat dari kementerian dan lembaga terkait, termasuk Plt. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi, serta Deputi III Bidang Perekonomian Kantor Staf Presiden (KSP) Edy Priyono. Dari Pemprov Sultra, perwakilan yang hadir antara lain dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), BPS, Balai Karantina, Biro Perekonomian, dan Dinas Ketahanan Pangan.

Dalam laporannya, Amalia Adininggar Widyasanti mengungkapkan bahwa pada Januari 2025 terjadi deflasi sebesar 0,76% secara month-to-month (m-t-m), dengan kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebagai

penyumbang deflasi terbesar sebesar 1,44%. Sementara itu, kelompok makanan, minuman, dan tembakau mencatat inflasi dengan andil 0,56%.

Pada minggu pertama Februari 2025, beberapa komoditas mengalami kenaikan harga, seperti cabai merah yang naik 7,23%, Minyakita naik 0,41%, dan gula pasir naik 0,89% dibanding Januari 2025. Sebaliknya, harga cabai rawit turun 4,35%, bawang putih turun 7,96%, bawang merah turun 7,96%, serta telur ayam ras turun 2,56%.

Kabupaten Bombana menjadi salah satu dari 10 daerah di luar Pulau Jawa dan Sumatera yang mengalami kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH) tertinggi, mencapai 3,96%. Berdasarkan data Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP) Kemendagri, kenaikan harga cabai rawit dan cabai merah menjadi faktor utama lonjakan IPH di beberapa wilayah tersebut.

Dengan kondisi ini, pemerintah daerah diminta meningkatkan pemantauan harga dan memastikan langkah-langkah strategis dalam pengendalian inflasi. Stabilitas harga bahan pokok menjelang Ramadan dan Idulfitri menjadi perhatian utama agar daya beli masyarakat tetap terjaga.

IWAPI Sultra Bagikan Makanan Bergizi untuk Anak Pesantren di HUT ke-50

Kendari, sultranet.com - Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-50, Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) Provinsi Sulawesi Tenggara membagikan makanan bergizi gratis kepada anak-anak di Pondok Pesantren Darul Mukhlisin, Kota Kendari. Kegiatan ini merupakan bagian dari dukungan IWAPI terhadap program pemerintah yang dipelopori Presiden Prabowo Subianto, dengan fokus pada pemberdayaan ekonomi perempuan dan peningkatan kesehatan masyarakat. Acara berlangsung pada Senin, 10 Februari 2025.

Ketua DPD IWAPI Sultra, Rinna Diazella, S.M., M.M., mengatakan kegiatan ini bertujuan untuk membantu meningkatkan kesehatan anak-anak, terutama dalam upaya menekan angka stunting di Sulawesi Tenggara.

“Kami sangat mendukung program pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. IWAPI Sultra berkomitmen berkolaborasi dengan berbagai pihak agar program ini dapat berjalan secara berkelanjutan,” ujar Rinna.

Ia menambahkan, IWAPI menargetkan pembagian 50.000 paket makanan bergizi di seluruh Indonesia, sejalan dengan usia organisasi yang kini menginjak 50 tahun. Namun, realisasi distribusi melampaui target dengan lebih dari 60.300 titik pembagian di 36 provinsi.

Almin, Sub Koordinator Bimbingan Masyarakat dan Gizi Kesejahteraan Sosial Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara, mengapresiasi kontribusi IWAPI dalam mendukung program prioritas pemerintah dalam menekan angka stunting.

“Kegiatan ini sangat relevan dengan program kesehatan nasional. Pemberian makanan bergizi diharapkan dapat membantu anak-anak mendapatkan asupan nutrisi yang cukup untuk pertumbuhan mereka,” kata Almin.

Ketua Yayasan Pondok Pesantren Darul Mukhlisin, H. Jamaludin, S.Ag., M.Pd.I., yang diwakili oleh pengurus pondok pesantren, mengungkapkan rasa syukur atas bantuan yang diberikan oleh IWAPI Sultra.

“Alhamdulillah, bantuan ini sangat bermanfaat bagi anak-anak kami. Kami berharap kegiatan ini bisa terus berlanjut dan memberikan manfaat yang lebih luas,” ungkapnya.

Makanan yang dibagikan dalam kegiatan ini telah memenuhi standar gizi seimbang, mencakup karbohidrat, protein, lemak sehat, serta vitamin dan mineral dari sayuran serta buah-buahan. Hal ini untuk memastikan anak-anak mendapatkan asupan nutrisi yang baik bagi pertumbuhan mereka.

IWAPI Sultra berharap program ini dapat menjadi agenda rutin yang melibatkan lebih banyak pihak, baik pemerintah daerah maupun masyarakat, untuk bersama-sama meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan anak-anak di Sulawesi Tenggara.

Polres Bombana Mulai Operasi Keselamatan Anoa 2025, Pengendara Wajib Tahu Ini

BOMBANA, sultranet.com - Polres Bombana menggelar Apel Pasukan tanda dimulainya Operasi Keselamatan Anoa 2025 di halaman Mapolres Bombana. Apel ini dipimpin langsung oleh Kapolres Bombana, AKBP Wisnu Hadi, S.I.K., M.I.K., dan dihadiri sejumlah pejabat daerah serta jajaran TNI-Polri. Senin (10/2/2025) pagi.

Operasi Keselamatan Anoa 2025 berlangsung selama 14 hari, mulai 10 hingga 23 Februari 2025. Operasi ini bertujuan meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam berlalu lintas dengan mengedepankan tindakan preemtif dan preventif, serta penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas.

Kapolres Bombana, AKBP Wisnu Hadi, S.I.K., M.I.K., dalam amanatnya menegaskan bahwa operasi ini bukan sekadar penegakan hukum, tetapi juga upaya edukasi kepada masyarakat agar lebih tertib berlalu lintas.

"Kami ingin membangun budaya tertib lalu lintas di Bombana. Operasi ini bertujuan untuk menyelamatkan nyawa dan mengurangi risiko kecelakaan di jalan raya," ujar Kapolres.

Apel gelar pasukan turut dihadiri Dandim 1431 Bombana Letkol Inf. Andi Irfandi, S.I.P., Kepala Dinas Perhubungan Bombana Ramsi Rafiu, S.H., M.Si., serta Sekretaris Satpol PP Bombana Dr. Muslimin, S.Ag., M.Pd., M.Si. Wakapolres Bombana Kompol Reda Irfanda, S.H., S.I.K., M.H., beserta Pejabat Utama (PJU) Polres Bombana juga hadir dalam kegiatan tersebut.

Sebagai bagian dari operasi ini, Satlantas Polres Bombana menetapkan 10 jenis pelanggaran lalu lintas yang menjadi prioritas penindakan. Di antaranya, pengendara yang menggunakan ponsel saat berkendara, pengemudi di bawah umur, serta pengendara yang berboncengan lebih dari satu orang.

Selain itu, pelanggaran seperti tidak menggunakan helm berstandar SNI bagi pengendara motor dan tidak memakai sabuk pengaman bagi pengemudi mobil juga menjadi sasaran operasi.

Pelanggaran lain yang mendapat perhatian adalah berkendara dalam pengaruh alkohol, melawan arus, serta melebihi batas kecepatan yang ditentukan. Kendaraan dengan muatan berlebih atau over dimensi dan over loading (ODOL) juga masuk dalam kategori pelanggaran yang ditindak.

Tak hanya itu, penggunaan knalpot yang tidak sesuai spesifikasi teknis serta kendaraan yang memakai sirine dan strobo tanpa izin turut menjadi fokus dalam operasi ini.



Kepala Satuan Lalu Lintas (Kasat Lantas) Polres Bombana, Kevin Fahri, S.Tr.K, S.I.K., menegaskan bahwa operasi ini lebih mengutamakan pendekatan persuasif, tetapi tetap akan ada penindakan terhadap pelanggaran yang berpotensi membahayakan.

“Kami mengimbau masyarakat untuk mematuhi aturan lalu lintas demi keselamatan bersama. Penggunaan helm, sabuk pengaman, serta tidak menggunakan ponsel saat berkendara adalah langkah sederhana yang dapat menyelamatkan nyawa,” jelas Kevin Fahri.

Kasat Lantas juga mengajak masyarakat untuk menjadikan keselamatan sebagai prioritas utama dalam berkendara.

“Mari kita wujudkan lalu lintas yang tertib dan aman di Bombana. Keselamatan berlalu lintas bukan hanya tanggung jawab aparat, tetapi juga seluruh pengguna jalan,” pungkasnya.

Apel ini diikuti oleh berbagai satuan, termasuk barisan perwira Polres Bombana, TNI-AD, Sat Samapta, Staf Polres, Sat Lantas, gabungan Resintel dan Narkoba, serta unsur Satpol PP dan Dinas Perhubungan.

Kegiatan berakhir pukul 08.40 WITA dan ditutup dengan doa bersama. Dengan digelarnya Operasi Keselamatan Anoa 2025, diharapkan kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas semakin meningkat, sehingga tercipta jalan yang lebih tertib, aman, dan nyaman bagi semua pengguna jalan.